

Berita Lingkungan Hidup

Satpol PP Intensifkan Penertiban Pedagang

Jakarta, Kompas - Menjelang penilaian untuk penghargaan Piala Adipura, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta mengintensifkan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Para pedagang yang menggunakan badan jalan atau trotoar di pasar dan terminal akan ditertibkan agar suasana kota menjadi tertib dan bersih.

"Kami akan tertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang, seperti jalan dan trotoar. Apalagi saat ini menjelang penilaian untuk Piala Adipura," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Harianto Badjoeri, Rabu (24/2) di Jakarta Pusat.

Usaha mempertahankan Piala Adipura dipandang sangat penting bagi DKI. Tahun 2009, kelima kota DKI Jakarta meraih Piala Adipura dan Jakarta Pusat menjadi pemenang dengan nilai tertinggi.

Menurut Harianto, para PKL sering menggunakan badan jalan dan trotoar untuk menggelar dagangan mereka. Kondisi itu sering menyebabkan kemacetan dan mengganggu para pejalan kaki. Apalagi para pedagang yang tidak tertib itu jumlahnya banyak dan tersebar di mana-mana.

Karena terlalu banyak, para PKL itu sering membentuk pasar liar di sekitar pasar resmi atau terminal. Jika tidak segera ditertibkan, kemacetan lalu lintas akan semakin parah. Wajah kota juga akan tampak kumuh.

Penertiban terhadap para PKL yang menempati lokasi tidak semestinya itu akan digelar di lima kota se-Jakarta. Di pasar-pasar besar yang menjadi pusat aktivitas kawasan, seperti Pasar tanah Abang, penertiban dan patroli akan dilakukan secara rutin agar tidak macet.

"Penertiban secara intensif baru dapat dilakukan saat ini. Sebelumnya, personel satpol PP tersita untuk menangani pengungsi banjir," kata Harianto.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, penertiban semacam itu efektif untuk pembersihan sesaat. Penertiban ini juga dapat digunakan untuk mendongkrak penilaian Piala Adipura yang hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu.

Namun, langkah itu dianggap tidak menyentuh akar persoalan PKL yang sebenarnya. PKL seharusnya diatur dan dibina secara konsisten, bukan ditertibkan dengan cara digusur.

PKL tumbuh karena banyak masyarakat kesulitan mencari pekerjaan di sektor formal. Jumlah yang banyak membuat PKL mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan turut menggerakkan perekonomian.

PKL, kata Nurdin, seharusnya diberi tempat dan dilokalisasi sehingga tidak menyebar di badan jalan dan trotoar. Dengan demikian, mereka tetap dapat tumbuh tanpa membuat badan jalan menjadi macet.

Setelah pengaturan PKL dilaksanakan, satpol PP seharusnya berfungsi untuk mencegah kedatangan PKL baru yang akan membuat kawasan menjadi tidak tertib. Jika dicegah sejak awal, pasar liar yang dipenuhi PKL tidak akan muncul.

Pengamat perencanaan kota, Yayat Supriyatna, mengatakan, keberadaan pedagang kaki lima adalah realitas khas Indonesia sehingga sulit untuk digusur secara total. Meskipun sering dicela karena membuat kemacetan dan kekumuhan, PKL juga dibutuhkan oleh banyak kalangan.

Oleh karena itu, penertiban PKL harus dilakukan dengan mawadahi mereka di tempat khusus agar tetap dapat dijangkau warga dan tidak menyebabkan kemacetan. Mereka juga harus diarahkan untuk menjual barang dan makanan berkualitas baik agar dapat mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya.(ECA)